

## Implementasi E-Office Melalui Aplikasi Bagelen Pada Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Rusliandy<sup>1</sup>, Apid Junaedi<sup>2</sup>, Syahrul Ramadhan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda Bogor; Indonesia

<sup>2,3</sup>Pemerintah Kecamatan Cibinong; Indonesia

Correspondence; rusliandy1980@gmail.com<sup>1\*</sup>, apidjunaedi@gmail.com<sup>2</sup>, ompimpaa@gmail.com<sup>3</sup>

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
<b>Abstract</b>	<p><i>The research focused on the implementation of the Bagelen application in Cibinong District with an analysis knife using the Edward III concept, namely from the aspects of communication, disposition, bureaucratic structure and resources. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and reference studies, as well as data analysis using source triangulation. The results of the study stated that the bagelen application had been running since 2021 and had a positive impact on government organizations and apparatus. However, in its implementation it is still faced with the following problems: (1) limited and passive quality of human resources. (2) the lurah's commitment is not optimal. (3) SOP has not been established in application management, and a decision letter has not been issued regarding the determination of the person in charge of implementing the application. (4) application development was built with sub-district self-help, and the existing infrastructure is still limited. In order to effectively implement the bagelen application policy in Cibinong sub-district, Bogor regency, the things that must be done are: (1) improve information technology competence for operators, and provide warning and motivation to be active in application management. (2) The sub-district head orders the lurah to commit to supporting the application. (3) The sub-district needs to immediately issue a decree on SOP and the official in charge of implementing Bagelen. (4) the need for support from the Bogor district government in terms of budget and infrastructure.</i></p>		
<b>Keywords</b>	<i>E-Office Implementation, Bagelen Application</i>		



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Tantangan organisasi pemerintah saat ini adalah dihadapkan pada era digital, yaitu era dengan akses luas dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk berbagai hal, salah satunya

penggunaan informasi dan layanan secara elektronik.<sup>1</sup> Organisasi pemerintah dituntut melakukan inovasi dan transformasi digital dalam tata Kelola pemerintahan.<sup>2</sup> Bahkan saat ini juga telah memasuki era society 5.0 dimana teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan manusia. Kondisi menuntut aparatur pemerintah untuk beradaptasi memahami dan menguasai teknologi informasi.<sup>3</sup>

Pada era desentralisasi, ruang gerak untuk melakukan inovasi semakin terbuka.<sup>4</sup> Setiap perangkat daerah didorong untuk melakukan inovasi di lingkungannya dengan gerakan *one agency one innovation*.<sup>5</sup> Bahkan salah satu aspek penilaian kinerja adalah adanya inovasi yang harus dilakukan oleh pegawai.<sup>6</sup> Dengan demikian, organisasi pemerintah selain harus berinovasi, juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Bentuk transformasi digital pada organisasi pemerintah, dapat dilakukan dalam pengelolaan perkantoran yang sebelumnya dilakukan secara manual, berubah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah Kecamatan Cibinong berupaya melakukan transformasi digital dengan membangun dan mengembangkan aplikasi bagelen sejak tahun 2021. Aplikasi ini berupaya mengelola surat menyurat, agenda kegiatan, pelayanan kecamatan, dan pemrosesan surat keputusan camat secara elektronik. Tujuannya tidak lain dalam rangka tertib administrasi, *paperless* dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Upaya pemerintah kecamatan Cibinong sebagai Upaya mempercepat pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Pentingnya keberadaan aplikasi bagelen bagi instansi pemerintah, menjadi menarik peneliti untuk menganalisis implementasi *e-office* melalui aplikasi bagelen pada Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Pisau analisis yang digunakan agar implementasi kebijakan berjalan efektif dilihat dari 4 aspek yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Jesus Lau, "Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning" (Indonesia, 2016).

<sup>2</sup> Rusliandy Rusliandy, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 1 (2022): 127.

<sup>3</sup> Yenti Juniarti, Setiyo Utoyo, and Gilang Ramadan, "Pengembangan Aplikasi Game Edukasi Dalam Membentuk Karakter Anak," *WIDYA WACANA: JURNAL ILMIAH* 16, no. 1 (2020).

<sup>4</sup> Undang-Undang, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014.

<sup>5</sup> Muhammad Immanuddin, "One Agency One Innovation Dan Telaah Keilmuannya," *Menpan. Go.Id.*

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah, *Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, 2019.

<sup>7</sup> Edward III and George C., *Implementing Public Policy*. (Washington DC.: Congressional Quarterly Press, 1980).

## **METODE**

Penelitian dilakukan untuk menganalisis hambatan dan tantangan dalam implementasi e-office melalui Bagelen pada kecamatan cibinong kabupaten bogor dengan menggunakan pisau analisis konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan, dan observasi. Sementara sumber data sekunder melalui analisis dokumen dan referensi atau studi pustaka. Informan pada penelitian ini meliputi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan operator pada kecamatan cibinong kabupaten bogor. Dalam hal analisis data, penelitian menggunakan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>8</sup> Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dengan membandingkan derajat kepercayaan atas informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Adapun proses triangulasi yang dilakukan<sup>9</sup>: (1) perencanaan triangulasi meliputi identifikasi pertanyaan kunci, identifikasi sumber informasi. (2) conducting triangulation, melalui pengumpulan data/laporan, observasi dari data individu, mengecek hipotesis dan identifikasi data tambahan yang akan diambil, merangkum temuan dan menarik kesimpulan. (3) communicating triangulation, yaitu menyajikan hasil dan merekomendasikan, serta menguraikan langkah tindak lanjut berdasarkan temuan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Konsep E-Office Melalui Bagelen**

Bagelen adalah suatu aplikasi yang dibangun oleh kecamatan cibinong dalam pengelolaan data surat menyurat mulai dari pencatatan dan pengarsipan surat masuk, pembuatan disposisi sebagai bahan agenda kegiatan harian yang ada di kecamatan cibinong, pembuatan nomor surat keluar berbasis web, pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATAEN) untuk perijin dan non

---

<sup>8</sup> Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010).

<sup>9</sup> Ibid.

perijinan, serta pemrosesan surat keputusan Camat. Adapun sasaran pengguna aplikasi bagelen adalah pengelola surat pada kecamatan maupun kelurahan di kecamatan cibinong kabupaten bogor.

Aplikasi bagelen dibangun dengan tujuan mempermudah pelayanan dan tertib administrasi dalam pengelolaan surat (surat masuk dan surat keluar), agenda kegiatan yang lebih tertata, disposisi surat yang lebih terarah dan sebagai pendukung penomoran surat keluar tanda tangan elektronik. Aplikasi ini juga sebagai Upaya dalam mengimplementasi *e-government* pada pemerintah kecamatan cibinong, sehingga diharapkan dapat membangun SDM *go digital* dengan indikator : (1) Mempermudah penomoran surat secara digital. (2) Meminimalisir penomor ganda dalam surat keluar. (3) Mengurangi penggunaan kertas (*Paperless*). (4) Menata Kegiatan yang lebih terstruktur dan agenda kegiatan digital. (5) Biaya operasional lebih rendah.

Aplikasi bagelen memiliki manfaat bagi organisasi dan aparatur kecamatan cibinong. Bagi organisasi, aplikasi bagelen memiliki manfaat mengurangi penggunaan kertas, mendukung implementasi tanda tangan elektronik yang sudah berjalan, pemetaan agenda kegiatan berbasis data elektronik, dan tertib administrasi. Sementara manfaat bagi aparatur adalah sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan. Aplikasi Bagelen dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi dengan indikator-indikator sebagai berikut: (1) dapat menciptakan *paperless* dan lebih akurat dalam pengarsipan. (2) mempermudah birokrasi. (3) memberikan manfaat bagi organisasi dan aparat kecamatan maupun kelurahan. (4) dapat diadopsi, diadaptasi dan direplikasi pada kecamatan atau kelurahan lain.<sup>10</sup>

Ruang lingkup aplikasi bagelen adalah sebagai berikut :

- a. Surat masuk dan surat keluar. Berbagai surat masuk dan surat keluar di input dalam aplikasi bagelen. Surat masuk ditidaklanjuti dengan disposisi pejabat yang berwenang kepada bawahannya.
- b. Rencana kerja dan agenda kegiatan. Berbagai rencana kerja di input dan menjadi pengingat bagi pejabat dan pegawai untuk agenda kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Rencana kerja tersebut sebagai indikator penilaian kerja pegawai.
- c. Pelayan adminitrasi terpadu kecamatan (PATEN) untuk perijinan meliputi ijin pemakaman, reklame, ijin rekomendasi pendirian atau perpanjangan tower.

---

<sup>10</sup> Rusliandy, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah."

- d. Pelayanan adminitrasi terpadu kecamatan (PATEN) untuk non perijinan meliputi surat keterangan domisili usaha, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan registrasi haji, surat keterangan pegawai yang akan pensiun, surat keterangan bagi warga yang akan seleksi TNI/POLRI, surat keterangan bagi TNI/POLRI yang akan menikah.
- e. Pemerosesan surat keputusan camat berupa surat keputusan tentang ijin pemakaman dan ijin reklame yang telah di delegasikan oleh Bupati kepada Camat. Selain itu juga pemerosesan surat keputusan Camat lainnya sebagai sarana pelaksanaan tugas pokok Camat

Adapun tahapan penggunaan aplikasi bagelen adalah : (1.) *User* (Pengelola Surat) dibuatkan akun oleh admin. (2.) *User* (Pengelola Surat) mengajukan penomoran surat dan memasukan agenda kegiatan (3.) Pengelola website melakukan verifikasi ditampilkan di bagelan.site. (4.) Penomoran dan agenda kegiatan sudah dapat tampil di website bagelan.site. Implementasi aplikasi bagelen memiliki sejumlah perbaikan dalam pengelolaan surat, Pelayanan PATEN dan agenda kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1: Perubahan Sebelum dan Setelah Implementasi Aplikasi Bagelen**

SEBELUM	SESUDAH
<b>SURAT MASUK</b>	
Pengarsipan manual: mudah hilang dan sulit dicari	Pengaripan digital: mempermudah dalam pencarian surat
Register melalui buku besar yaitu terjadi penulisan ganda dalam pencatatan	Register melalui aplikasi : secara ssstem tidak memungkinkan terjadi ganda register
Disposisi Surat Manual: Tercecernya surat dan tidak sampai ke yang diberi disposisi	Agenda kegiatan secara digital: Notifikasi disposisi tiap bagian atau pengelola surat
Pelaporan Manual: tidak akuratnya jumlah karena di hitung satu persatu berdasarkan buku besar surat masuk	Pelaporan digital : lebih akurat dan sesuai dengan jumlah
<b>SURAT KELUAR</b>	
Penomoran : menggunakan buku besar dan dicatat secara manual	Penomoran : dilakukan secara sistem dan tidak memungkinkan terjadi ganda dalam penomoran
Penandatanganan secara manual: menghambat dalam kegiatan jika pimpinan tidak ditempat	Penandatanganan Secara Elektronik : dapat di lakukan di manasaja dan <i>real time</i>
Pengarispan manual: mudah hilang dan sulit di cari	Pengaripan digital: mempermudah dalam pencarian surat
<b>PATEN PERIJINAN / NON PERIJINAN, SURAT KEPUTUSAN, AGENDA KEGIATAN</b>	
PATEN perijinan/non perijinan, surat	PATEN perijinan/non perijinan, surat

keputusan, agenda kegiatan dilakukan secara manual	keputusan, agenda kegiatan dilakukan secara digital
--	---

Sumber : Dokumen Inovasi Kecamatan Cibinong, 2021

## Implementasi bagelen pada Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Pada organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah akan dihadapkan pada berbagai kebijakan publik. Kebijakan publik diartikan sebagai berbagai kebijakan yang dipilih oleh pemerintah atau aparatur pemerintah.<sup>11</sup> Kebijakan publik juga diartikan sebagai apa yang dilakukan pemerintah, apa yang melatar belakangi kegiatan yang dipilih pemerintah, dan apa perbedaan dari kebijakan yang dipilih pemerintah.<sup>12</sup> Kebijakan atau kegiatan yang dipilih tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan dalam pemerintahan atau membangun iklim inovasi dalam oraganisasi.

Hal terpenting dalam suatu kebijakan adalah implementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang terbaik, kalo tidak dapat di implementasikan hanyalah sebagai dokumen yang tidak bermakna (Tjahjan). Implementasi kebijakan adalah penentu tercapainya tujuan yang diinginkan, sehingga organisasi pemerintah harus menjamin implementasi suatu kebijakan. Analisis dari implentasi kebijakan diperlukan dalam rangka mengidentifikasi faktor penghambat, tantangan, hambatan, dan ancaman dari suatu kebijakan.<sup>13</sup>

Dalam rangka memujudkan implementasi kebijakan yang efektif, terdapat 4 faktor yang harus diperhatikan yaitu<sup>14</sup>:

- a. Komunikasi meliputi penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi. Implementator kebijakan dan sasaran kebijakan harus memahami dan mengetahui kebijakan yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi

---

<sup>11</sup> B Anderson, *The Nation and the Origins of National Consciousness*. In: Maria Montserrat Guibernau i Berdún, Montserrat Guibernau, John Rex (Eds) *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism & Migration* (56-63) (UK: Polity Press, 2010).

<sup>12</sup> Thomas R Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Prantice Hall, 1992).

<sup>13</sup> Chief J. O Udoji, *The African Public Servant As Public Policy in Africa*. (Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management, 1981).

<sup>14</sup> Ismail Nurdin and Megawati Cindy Rorimpandey, "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan," *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* (2019): 1-13.

kebijakan. Disisi lain regulasi kebijakan juga harus jelas dan konsisten, agar pelaksana kebijakan tidak kebingungan atau menjadi hambatan dalam implementasi.

- b. Struktur birokrasi meliputi prosedur tata kerja sesuai dengan *standard operating Procedure* (SOP), fragmentasi atau tanggung jawab kebijakan, dan struktur kelembagaan.
- c. Sumber daya. Dalam implementasi kebijakan dibutuhkan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana prasarana, metode atau strategi. Sumber daya yang penting meliputi kecukupan dan kualifikasi, kewenangan, informasi dan sarana prasarana.
- d. Disposisi yaitu sikap para pelaksana kebijakan yang mendukung pelaksanaan kebijakan<sup>15</sup>

Disisi lain Organisasi pemerintahan saat ini dihadapkan pada kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yaitu perubahan dalam skala besar, kesulitan melakukan prediksi secara akurat, kerumitan tantangan akibat berbagai factor yang saling terkait, dan ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibatnya.<sup>16</sup> Kondisi ini menuntut adanya perubahan organisasi pemerintahan melalui penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan menciptakan ide baru, atau inovasi yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi serta pola pikir *agile*.<sup>17</sup>

Pemerintah kecamatan cibinong menyikapi kondisi VUCA, dengan melakukan transformasi digital dalam pengelolaan *e-office*. Transformasi digital yang dilakukan dengan membangun aplikasi bagelen. Aplikasi ini dibangun dan diimplementasikan mulai tahun 2021 dan mengalami beberapa perubahan serta pengembangan.

Implementasi aplikasi bagelen menghadapi sejumlah hambatan dan permasalahan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III sebagai berikut :

- a. Komunikasi

Kebijakan transformasi digital pengelolaan *e-office* melalui aplikasi bagelen dituangkan dalam surat Keputusan Camat Cibinong nomor 048/016.b/kpts/VIII/2021/Kec tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Aplikasi Begelen. Dalam penetapan kebijakan tersebut mengatur penetapan aplikasi bagelen dan tim pengelola aplikasi bagelen. Setelah penetapan aplikasi,

---

<sup>15</sup> Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004).

<sup>16</sup> N Horney, B Pasmore, and T O'Shea, "Incomplete Document Leadership Agility : A Business Imperative for a VUCA World," *People & Strategy*, 33, no. 4 (2010).

<sup>17</sup> Fauziah Mukhlisah, "Pelatihan Kepemimpinan Smart Governance : Adaptasi Era VUCA Smart Governance Leadership Training : Adaptation VUCA Era.," *Jurnal Analisis Kebijakan* 5, no. 2 (2021).

pemerintah kecamatan cibinong melakukan sosialisasi bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan cibinong. Sosialisasi ini meliputi pembuatan *user id* bagi pengguna, tujuan pembangunan aplikasi, manfaat aplikasi, sasaran aplikasi, pengelolaan aplikasi. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menyatukan pemahaman bagi pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan dan yang terkena dampak kebijakan. Hal ini juga dalam rangka menghindari pertentangan pendapat dari para pelaksana kebijakan.<sup>18</sup>

Dalam rangka mencapai konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan, kecamatan cibinong melakukan pertemuan bulanan dengan para operator kecamatan dan kelurahan untuk membahas berbagai hambatan, tantangan dan permasalahan implementasi aplikasi bagelen. Hasil diskusi tersebut dapat teridentifikasi bahwa terdapat hambatan sebagai berikut : (1) terdapat sebagian kecil operator yang pasif sehingga tidak menyampaikan hambatan yang terjadi di lingkungannya. Hal ini menyebabkan implementasi aplikasi bagelen tidak berjalan optimal. (2) komitmen sebagian kecil lurah dalam aplikasi bagelen yang membuat penggunaan aplikasi bagelen kurang optimal.

#### b. Struktur birokrasi

Aplikasi bagelen diusung oleh sekretaris kecamatan cibinong dan sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020<sup>19</sup> bahwa yang harus menjamin implementasi aplikasi bagelen adalah kasubag umum dan kepegawaian pada kecamatan cibinong. Tidak ada perubahan struktur organisasi dalam implementasi kebijakan tersebut, namun pelaksanaan kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020. Sementara pelaksanaan kebijakan di lingkungan kelurahan menjadi tugas sekretaris kelurahan<sup>20</sup> dan atau operator kelurahan.

Penentuan operator kelurahan sebagai pengelola aplikasi bagelen diatur dalam surat keputusan camat cibinong Nomor 048/017.b/kpts/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Tentang Penetapan Tim Pengelola Aplikasi Bagelen di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Namun pemerintah kecamatan cibinong belum menetapkan penanggung jawab pengelolaan bagelen pada

---

<sup>18</sup> Fasli Jalal, Winarno Surakhmad, and Fasli Jalal, "Paradigma Baru Pendidikan Islam," *Jurnal Penelitian* 11, no. 1 (2002): 141–174.

<sup>19</sup> Peraturan Bupati Bogor, *Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan*, 2020.

<sup>20</sup> Peraturan Bupati Bogor, *Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan*, 2016.

kecamatan atau kelurahan. Seharusnya penetapan kasubag umum dan kepegawaian di tingkat kecamatan dan sekeretasis kelurahan di tingkat kelurahan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kebijakan aplikasi bagelan dituangkan dalam surat keputusan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Edwad III bahwa dibutuhkan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

Permasalahan lain dalam implementasi kebijakan aplikasi bagelen terletak pada belum di tetapkannya Standard Operasional Prosedure (SOP) dalam pengelolaan aplikasi bagelen. Padahal keberadaan SOP sangat penting untuk pencapaian standar minimal suatu pelayanan, serta indikator keberhasilan dan kualitas suatu pelayanan.

#### c. Sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam implementasi aplikasi bagelen pada kecamatan cibinong adalah sebagai berikut : *pertama*, sumber daya manusia. Terdapat 8 pegawai pada tingkat kecamatan dan 13 pegawai pada tingkat kelurahan. Pada tingkat kecamatan terdapat 1 administrator dan 7 operator dari masing masing seksi dan kasubag. Sementara pada kelurahan terdapat 1 operator di masing-masing kelurahan. Terdapat hambatan berupa tidak meratanya kualitas sumber daya manusia. Masih ada operator yang masih berpendidikan SMA dan minim penguasaan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berkeahlian komputer oleh pemerintah kabupaten bogor. Operator yang ada saat ini di dominasi pegawai dengan status outsourcing dengan gaji bawah Upah Minimum kabupaten bogor.

*Kedua*, sumber daya anggaran. Dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi bagelen, dibiayai secara swadaya kecamatan dan belum di dukung oleh anggaran APBD Kabupaten Bogor. Begitu pun dalam kegiatan sosialisasi, atau evaluasi rutin bagi para operator, maupun pengembangan aplikasi belum didukung oleh anggaran APBD kabupaten Bogor.

*Ketiga*, sarana dan prasarana. Dalam implementasi aplikasi bagelen dibutuhkan sarana prasarana penunjang yaitu komputer, akses internet, *hosting* dan *domain*. Namun dalam prakteknya kecamatan dan kelurahan belum didukung oleh komputer yang memadai dan akses internet yang cepat. Hal ini di karenakan keterbatasan anggaran atau fasilitas yang disediakan dinas komunikasi dan informasi yang belum cukup menunjang dalam implementasi aplikasi bagelen.

#### d. Disposisi

Para pelaksana kebijakan baik ditingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan mendukung kebijakan dan implementasi kebijakan aplikasi bagelen. Hal ini dikarenakan kebutuhan para pegawai untuk tertib administrasi dan peningkatan pelayanan berbasis digital. Dukungan para pelaksana kebijakan diawali pada saat sosialisasi kebijakan aplikasi bagelen. Terdapat pemikiran dan sudut pandang yang sama dalam menciptakan kepatuhan dan komitmen implementasi kebijakan. Hal ini diperkuat dengan adanya perintah dari camat kepada para lurah/kasi/kasubag sebagai bentuk perintah untuk mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

#### **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan aplikasi bagelen pada kecamatan cibinong kabupaten bogor telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hambatan atau permasalahan sebagai berikut : (1) Sebagian kecil operator bersikap pasif sehingga implementasi aplikasi tidak berjalan optimal. (2) komitmen sebagian kecil lurah dalam aplikasi bagelen kurang optimal. (3) belum ditetapkannya SOP pengelolaan aplikasi bagelen. (4) kecamatan cibinong belum menetapkan penanggung jawab implementasi aplikasi bagelen pada tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. (5) kualitas sumber daya manusia sebagai operator belum merata. masih didominasi kualifikasi pendidikan SLTA dan minim pemahaman atau penguasaan teknologi informasi (6) pembangunan dan pengembangan aplikasi bagelen dibiaya secara swadaya kecamatan, belum didukung oleh APBD kabupaten bogor. (7) implementasi aplikasi belum di dukung oleh sarana dan prasana yang memadai. Dalam rangka efektifitas implementasi kebijakan aplikasi bagelen pada kecamatan cibinong kabupaten bogor, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah: (1) memotivasi, menegur dan memerintahkan operator untuk aktif dalam pengelolaan aplikasi bagelen. (2) camat cibinong memerintahkan lurah untuk komitmen dan konsisten mendukung implementasi aplikasi bagelen. (3) Kecamatan cibinong perlu segera menetapkan melalui keputusan camat tentang SOP pengelolaan aplikasi bagelen. (4) kecamatan cibinong perlu segera menetapkan keputusan camat tentang pejabat penanggung jawab implementasi kebijakan aplikasi bagelen di tingkat kecamatan dan kelurahan. (5) pemerintah kabupaten bogor atau kecamatan cibinong melakukan pengembangan kompetensi teknologi informasi bagi para operator atau ada penempatan PNS

atau P3K yang memiliki kompetensi ilmu komputer. (6) pemerintaah kabupaten bogor perlu mengalokasikan anggaran dalam pengembangan aplikasi bagelen. (7) pemerintah daerah perlu mendukung sarana prasarana.

## REFERENCES

- Anderson, B. *The Nation and the Origins of National Consciousness*. In: Maria Montserrat Guibernau i Berdún, Montserrat Guibernau, John Rex (Eds) *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism & Migration* (56-63). UK: Polity Press, 2010.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010).
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prantice Hall, 1992.
- Horney, N, B Pasmore, and T O'Shea. "Incomplete Document Leadership Agility : A Business Imperative for a VUCA Wolrd." *People & Strategu*, 33, no. 4 (2010).
- III, Edward, and George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Immanuddin, Muhammad. "One Agency One Innovation Dan Telaah Keilmuannya." *Menpan. Go.Id.*
- Jalal, Fasli, Winarno Surakhmad, and Fasli Jalal. "Paradigma Baru Pendidikan Islam." *Jurnal Penelitian* 11, no. 1 (2002): 141–174.
- Juniarti, Yenti, Setiyo Utoyo, and Gilang Ramadan. "Pengembangan Aplikasi Game Edukasi Dalam Membentuk Karakter Anak." *WIDYA WACANA: JURNAL ILMIAH* 16, no. 1 (2020).
- Lau, Jesus. "Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning." Indonesia, 2016.
- Mukhlisah, Fauziah. "Pelatihan Kepemimpinan Smart Governance : Adaptasi Era VUCA Smart Governance Leadership Training : Adaptation VUCA Era." *Jurnal Analisis Kebijakan* 5, no. 2 (2021).
- Nurdin, Ismail, and Megawati Cindy Rorimpandey. "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* (2019): 1–13.
- Peraturan Bupati Bogor. *Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan*, 2016.
- — —. *Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan*, 2020.
- Peraturan Pemerintah. *Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, 2019.
- Rusliandy, Rusliandy. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 1 (2022): 127.
- Udoji, Chief J. O. *The African Public Servant As Public Policy in Africa*. Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management, 1981.
- Undang-Undang. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014.

Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2004.